



## **Reforma Agraria Di Bidang Pertanian :**

Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten<sup>1</sup>

Martua Sihalohe, Heru Purwandari, dan Anton Supriyadi

### **ABSTRAK**

*Sumberdaya agraria merupakan salah satu faktor utama bagi stakeholder, khususnya petani. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang reforma agraria di bidang pertanian menjadi penting diwujudkan, khususnya dengan mengkaji hubungan antara perubahan struktur agraria dan differensiasi kesejahteraan petani. Hasil penelitian di Kabupaten Lebak menunjukkan, lahan dan modal menjadi dua faktor penting dalam usahatani pertanian. Perubahan struktur agraria mempengaruhi differensiasi kesejahteraan petani. Arah perubahan struktur agraria yang terjadi stratifikasi dan polarisasi.*

*Kata Kunci: struktur agraria, differensiasi, kesejahteraan, petani*

### **PENDAHULUAN**

Dewasa ini kajian terhadap agraria menjadi wacana yang banyak dikaji oleh kalangan pemerintah, LSM, swasta dan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Trend tersebut relevan dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara agraris mengharuskan agar politik dan kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria berkontribusi nyata dalam proses mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (amanat sila kelima Pancasila) atau proses “mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat” (amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Sejalan dengan UUD 1945 tersebut, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menyatakan secara jelas bahwa dalam rangka mewujudkan kesemua ini maka pembaruan agraria merupakan suatu keharusan. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pemerintah (Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla) telah menyatakan komitmennya untuk menjadikan agenda pembaruan agraria sebagai bagian dari visi, misi dan program pemerintahan. Pelaksanaan agenda ini diletakkan dalam dua kerangka program pembangunan nasional, yaitu bagian dari agenda “perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja” dan “revitalisasi pertanian dan aktivitas pedesaan

Pada kasus perkebunan di Indonesia, komoditas perkebunan dikembangkan melalui dua pendekatan, yaitu “perkebunan rakyat” yang diusahakan oleh petani dan “perkebunan besar” yang diusahakan oleh perusahaan. Hampir seluruh enam komoditas perkebunan utama dikembangkan oleh perkebunan rakyat, kecuali pada

---

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan hasil penelitian berdasarkan payung penelitian IPB Tahun 2008

kelapa sawit (lihat Tabel 1). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa komoditas perkebunan di Indonesia menjadi tumpuan kehidupan dan sumber kesejahteraan masyarakat desa. Peranan tersebut semakin penting mengingat prospek pasar komoditas perkebunan masih saja meningkat, disertai ketersediaan sumberdaya lahan (lihat Tabel 2).

Berkaitan dengan kenyataan tersebut, sejak tahun 2007 sebanyak tiga dari enam komoditas perkebunan utama masuk dalam program revitalisasi perkebunan, yaitu kakao, kelapa sawit, dan karet. Data Direktorat Jenderal Perkebunan (2002) menunjukkan bahwa di antara ketiga komoditas tersebut, kakao dan kelapa sawit merupakan komoditas yang sama-sama sedang berkembang pesat. Namun demikian, terdapat perbedaan mencolok dalam rasionalitas ekonomi dan kapitalisasi, yaitu sebanyak 85 persen kakao dikembangkan melalui pendekatan perkebunan rakyat dengan kapitalisasi rendah, sedangkan komoditas kelapa sawit yang dikembangkan melalui perkebunan rakyat hanya 35 persen (kapitalisasi tinggi). Bahkan di Pulau Sulawesi, luas perkebunan kakao yang dikembangkan oleh petani mencapai 98.5 persen dan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mencapai 100 persen.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis perbedaan struktur agraria menurut ekologi Jawa-Luar Jawa, ekonomi subsisten-kapitalis, stratifikasi-polarisasi sosial, pemanfaat program pemerintah atau bukan (Soentoro, 1980), (2) untuk menganalisis perubahan struktur menuju polarisasi atau peningkatan stratifikasi (Hayami dan Kikuchi, 1987), (3) untuk menganalisis persamaan dan perbedaan proses perubahan struktur agraria dapat dibandingkan antara perkebunan kakao di wilayah NAD dan Sulawesi Tengah dengan kelapa sawit di Jawa Barat, dan (4) untuk merumuskan landasan dasar yang kuat dan akurat dalam rumusan reforma agraria di bidang perkebunan khususnya dalam konteks revitalisasi pertanian

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Realitas sosial yang dijadikan lapangan studi mencakup dimensi tindakan atau “dimensi luar” manusia (seperti bentuk hubungan sosial dan struktur sosial) serta dimensi kesadaran atau “dimensi dalam” manusia (seperti motivasi aktor dalam melakukan tindakan sosial). Melalui peneropongan dari luar kita akan membandingkan, mencari kaitan, mencari sebab, menelusuri sejarah, dan hal-hal lahiriah lainnya, dan kita menganalisisnya dengan analisis empiris. Sementara itu, melalui pemahaman dari dalam kita dapat menemukan kompleks perasaan, keinginan, atau pikiran yang merupakan realitas “batin” yang diteliti.

Metoda kasus historis dipilih sebagai salah satu strategi penelitian ini karena: (1) pokok kajian dalam penelitian ini bukan suatu kejadian sosial pada suatu waktu tertentu melainkan merupakan gejala sosial atau proses sosial dalam rentang waktu tertentu, dan (2) proses sosial yang dikaji dibatasi dalam cakupan kontemporer yang sebagian pelakunya masih hidup. .

### **Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, yaitu mulai akhir bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2008. Pengumpulan Data dilakukan pada bulan Agustus sampai November 2008. Mengingat studi ini adalah studi komparatif, maka pada

tahun 2007/2008 telah dilakukan penelitian pada beberapa komunitas pekebun berbasis tanaman kakao yang memiliki latarbelakang spesifik lokal berbeda (Sulawesi Tengah dan Nanggroe Aceh Darussalam), sehingga pada tahun tersebut juga dapat dituntaskan analisa komparatif diantara beragam komunitas pekebun kakao. Kemudian pada tahun 2008, hal yang sama (sebagaimana dilakukan terhadap pekebun kakao di Sulawesi Tengah) telah dilakukan penelitian pada beberapa komunitas pekebun kelapa sawit di Kabupaten Kampar-Riau.

### **Lokasi Kegiatan**

Penelitian ini dilakukan di wilayah perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penentuan lebih lanjut komunitas kelapa sawit rakyat yang akan dijadikan lokasi penelitian akan didasarkan pada latar belakang spesifik lokal komunitas (asal etnis dan keadaan ekologis) serta pola pengembangan perkebunan rakyat. Selanjutnya, lokasi penelitian untuk studi komparatifnya adalah di Sulawesi Tengah, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), komunitas berbasis kakao, studi tahun 2007 dan di Riau, komunitas berbasis kelapa sawit. Kedua komunitas tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut (1). mulai tahun 2007 kedua komoditas tersebut termasuk dalam program revitalisasi perkebunan, (2). kedua komoditas tersebut masih mengalami perkembangan yang cukup pesat, (3). kedua komoditas dikembangkan dengan pola yang berbeda dimana sebanyak 85 persen komoditas kakao dikembangkan melalui pendekatan perkebunan rakyat sedangkan kelapa sawit hanya 35 persen, (4) kedua komunitas dikembangkan dan dikelola dengan tingkat komersialisasi yang berbeda dimana kelapa sawit lebih komersial, dan (5) dapat merumuskan perbandingan antara Jawa dan Luar Jawa (Tabel 4).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dan informasi yang dikumpulkan terdiri dari: 1) data dan informasi primer, 2) data dan informasi sekunder. Data dan informasi sekunder terutama dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang dimiliki Perusahaan, Pemerintahan Desa dan Kecamatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan informasi dikumpulkan dengan tiga cara sehingga prinsip triangulasi metode dan sumber data terpenuhi, yaitu wawancara perorangan, diskusi kelompok terfokus, observasi lapangan, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap responden dan informan perorangan, dengan menggunakan suatu pedoman pertanyaan dan kuesioner. Sementara diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dilakukan dengan mengundang para petani, para pengurus/tokoh organisasi lokal, serta pelaku terkait lainnya untuk secara bersama-sama mendiskusikan perihal posisi dan peranan setiap kelompok aktor dalam menjalankan/mengembangkan usaha perkebunan, dalam proses perubahan struktur agraria, dan dalam mencapai kesejahteraan keluarga yang tinggal dalam sebuah komunitas yang sama. Diskusi kelompok dilaksanakan baik untuk memperoleh data stratifikasi sosial maupun penguasaan sumberdaya agraria.

Wawancara terhadap responden dilaksanakan untuk pengumpulan data dan informasi tentang karakteristik rumah tangga pekebun, data dan informasi tentang penguasaan lahan oleh masing-masing rumah tangga pekebun, data dan informasi

tentang sumber dan jumlah penerimaan pekebun, jenis dan jumlah pengeluaran keluarga rumah tangga pekebun.

### **Metode Analisis**

Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan terhadap data dan informasi tentang proses perubahan atau tentang motivasi yang melandasi tindakan sosial seseorang aktor utama atau tindakan sosial aktor lain yang berkaitan dengan tindakan sosial aktor utama tersebut. Sebagaimana dikemukakan Lewis (1988), analisa kualitatif dapat digunakan dalam mendeskripsikan pola-pola hubungan sosial, baik dimensi struktur (posisi dan peranan aktor), dimensi pengaturan (prosedur, penetapan insentif atau sanksi), serta sistem-sistem makna yang melandasi dan memberi pedoman terhadap pola-pola hubungan tersebut.

Bertolak dari strategi penelitian yang merupakan studi kasus majemuk, maka menurut Yin (2002) analisis data dapat didekati dengan melakukan: (1). penjodohan pola, (2) pembuatan penjelasan, dan (3) analisis deret waktu. Data dan informasi kualitatif hasil wawancara perorangan dan hasil diskusi kelompok terfokus yang telah ditransfer kedalam bentuk catatan harian ditambah dengan sari dokumen (laporan, makalah, surat) dianalisis dengan menggunakan matriks analisis yang membandingkan ragam kategori data. Penjelasan akan dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu: (1). penjelasan tentang bentuk realitas sosial (bentuk moda produksi, bentuk struktur agraria, dan bentuk kesejahteraan petani), dan (2). penjelasan tentang pandangan subyektif para aktor mengenai motif /kesadaran dari tindakan sosial mereka dalam mengembangkan suatu realitas sosial.

Untuk mengurangi salah interpretasi, akan digunakan beragam prosedur yang disebut triangulasi (*triangulation*). Menurut Stake (2000), triangulasi merupakan proses penggunaan banyak persepsi (*multi perception*) dalam mengklarifikasi arti (*meaning*) dan dalam memverifikasi pengulangan pelaksanaan observasi dan interpretasi. Triangulasi dalam mengklarifikasi arti dilakukan melalui identifikasi cara yang berbeda dalam mengamati suatu realitas

## **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Awal Mula Munculnya Perkebunan Kelapa Sawit dan Profil Dua Komunitas Petani Lokasi Penelitian**

Pembukaan lahan dilakukan pada tahun 1980-an. Lahan yang dikonversi untuk perkebunan sawit terdiri dari lahan Perhutani dan lahan masyarakat yang nantinya akan diplasmakan. Pada awal pembukaan masyarakat menolak adanya pengembangan perkebunan. Hal ini disebabkan masyarakat khawatir dengan potensi ekonomi perkebunan sawit ke depan bisa merubah kesejahteraan petani menjadi lebih baik atau tidak. Penolakan yang terjadi tidak sampai pada gejala konflik manifest akan tetapi masih bersifat laten.

Pada fase awal setelah pembukaan lahan, pengelolaan kebun masih dilakukan oleh PTPN. Masyarakat hanya menjadi pekerja di perkebunan tersebut. Pada tahun 1984, truktur pekerja perkebunan mulai dibentuk, mulai dari mandor hingga tenaga lapangan. Selanjutnya pada tahun 1987-1988, kebun sawit yang dikonversi dari lahan masyarakat mulai diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Penyerahan

fase awal dilakukan di desa sekitar PTPN, menyusul kemudian desa lain yang jaraknya tidak terlalu berdekatan dengan PTPN.

Dalam proses penyerahan lahan tersebut, masyarakat sekaligus mendapatkan perumahan dan lahan kebun non sawit. Luasan untuk perumahan sekitar 0.2 hektar, sedangkan luasan kebun/ladang 0.3 hektar. Pada tahun ini pembangunan PKS sudah terselesaikan sehingga dapat menampung panen yang dihasilkan dari kebun sekitar PKS, baik kebun inti maupun plasma. Di tingkat petani mulai dibentuk KUD-KUD sebagai representasi kelompok petani dalam kaitannya dengan sistem inti plasma dengan PTPN. KUD berfungsi sebagai media penyedia saprotran petani dari PTPN dan pengumpul hasil panen dari petani sebelum di jual ke PTPN.

Pada tahun 1990-an, masyarakat mulai menempati rumah-rumah dari PTPN sebagai bagian dari sistem inti-plasma yang mereka lakukan dengan PTPN. Selanjutnya, pada 1997, KUD dibubarkan oleh masyarakat karena terjadi persoalan ketidakpercayaan masyarakat terhadap peran KUD dalam merepresentasikan kepentingan petani. Pasca pembubaran ini peran KUD secara otomatis digantikan oleh kelembagaan lain yang sebenarnya selama ini juga telah ada yaitu tengkulak (pedagang pengumpul).

Pada tahun 2000, sebagian masyarakat mulai meninggalkan rumah-rumah yang mereka dapatkan dari penyerahan PTPN pada saat penyerahan kebun. Masyarakat kembali menempati pusat-pusat perkampungan yang ada. Hal ini menyebabkan sebagian rumah yang ditinggalkan tidak terawat. Secara singkat, perbandingan di dua lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.

### **Diferensiasi Struktur Masyarakat Agraris**

Menurut Sanderson (2003), masyarakat agraris adalah masyarakat yang menyandarkan hidupnya pada pertanian, baik sebagai pemilik lahan maupun bukan pemilik lahan (tunakisma). Sumberdaya agraria (lahan) digunakan secara berkesinambungan (periode kosong penggunaan lahan sangat pendek atau bahkan tidak ada lagi). Oleh sebab itu, gambaran struktur (sosial) masyarakat agraris yang merujuk pada peta hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat agraris akan bertumpu pada posisi para petani dalam penguasaan sumberdaya agraria, baik melalui mekanisme penguasaan tetap (pemilikan) mau-pun penguasaan sementara (seperti bagi hasil). Kemudian diferensiasi struktur masyarakat agraris merujuk pada keberadaan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang posisinya dalam penguasaan sumberdaya agraria tidak sama.

Setelah berakhirnya struktur agraria yang dibangun melalui penguasaan kolektif, ternyata struktur agraria yang dibangun melalui penguasaan perorangan tidak lagi terbuka sebagaimana periode sebelumnya. Pada periode penguasaan perorangan ini ketidaksamaan akses di antara warga komunitas dalam penguasaan sumberdaya agraria mulai muncul dan cenderung meningkat. Oleh sebab itu, bagi komunitas petani yang sumber kehidupannya berbasis pada sumberdaya agraria, maka munculnya transformasi struktur agraria tersebut akan memberi jalan pada proses berlangsungnya diferensiasi struktur (sosial) masyarakat agraris, yaitu dari struktur masyarakat agraris yang “egaliter” (merata) menjadi struktur masyarakat agraris yang “semakin terdiferensiasi”.

Hasil sensus terhadap seluruh rumahtangga petani di dua komunitas petani lokasi penelitian menunjukkan bahwa struktur masyarakat agraris komunitas petani sawit dan kakao yang muncul saat ini terdiferensiasi dalam banyak lapisan. Sebagian dari lapisan-lapisan tersebut dibangun dengan status “tunggal” (status dimaksud merupakan basis dasar pelapisan masyarakat), sedangkan sebagian lapisan-lapisan lainnya dibangun dengan status jamak atau “kombinasi”. Secara lebih rinci, berbagai lapisan masyarakat agraris yang muncul dalam dua komunitas petani sawit di lokasi penelitian adalah:

1. Petani Pemilik. Para petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria hanya melalui pola pemilikan tetap (baik petani pemilik yang lahannya diusahakan sendiri dan/atau petani pemilik yang lahannya diusahakan oleh orang lain),
2. Petani Pemilik + Penggarap. Para petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria tidak hanya melalui pola pemilikan tetap tetapi juga melalui pemilikan sementara (dengan cara mengusahakan lahan milik petani lain melalui sistem bagi hasil, sewa, atau gadai)
3. Petani Pemilik + Buruh Tani. Para petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria melalui pola pemilikan tetap. Selain itu, untuk menambah penghasilan keluarganya, mereka juga menjalankan peranan sebagai seorang buruh tani<sup>2</sup>
4. Petani Penggarap. Para petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria hanya melalui pola pemilikan sementara (dengan cara mengusahakan lahan milik petani lain, umumnya melalui sistem bagi hasil). Ditinjau dari sisi pemilikan, lapisan petani penggarap termasuk tunakisma, tetapi kategori tunakisma petani penggarap menjadi tidak mutlak karena ditinjau dari sisi penggarapan sumberdaya agraria mereka termasuk petani penguasa tanah (efektif)
5. Petani Penggarap + Buruh Tani. Para petani pada lapisan ini menguasai sumberdaya agraria melalui pola pemilikan sementara (dengan cara mengusahakan lahan milik petani lain melalui sistem bagi hasil, sewa, atau gadai). Selain itu, untuk menambah penghasilan keluarga, mereka juga menjalankan peranan sebagai buruh tani. Sebagai mana lapisan petani penggarap, lapisan ini termasuk tunakisma tetapi tidak mutlak.
6. Buruh Tani. Para petani pada lapisan ini benar-benar tidak menguasai sumberdaya agraria, sehingga dapat dikategorikan sebagai tunakisma mutlak. Walaupun demikian, mereka masih memperoleh manfaat dari sumberdaya agraria dengan cara menjadi buruh tani. Pada umumnya buruh tani di desa lokasi penelitian juga menjadi buruh kegiatan non pertanian dan/atau mencari hasil hutan (terutama pada saat peluang berburuh tani tidak ada).

---

<sup>2</sup> Sebenarnya petani yang merangkap sebagai buruh tani sudah ditemukan Geertz dalam studi lapang yang dilakukan awal tahun 50 an (Geertz, 1976). Para buruh tebu di Jawa saat itu juga merupakan petani pemilik sehingga selain mereka sebagai petani rumahtangga yang berorientasi komunitas juga buruh upahan.

Keenam lapisan masyarakat tersebut terdapat hanya di Desa Bojong Juruh. Akan tetapi dari pemilikan tanah, Desa Kerta lebih banyak menguasai lahan dibandingkan dengan Desa Bojong Juruh. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan komoditi yang ditanam. Akan tetapi, kasus di Desa Kerta ini pada prinsipnya lebih karena faktor kesejahteraan.

Berbeda dengan penelitian pada tahun 2007 yang dilakukan pada komunitas berbasis kakao, pada penelitian yang berbasis sawit ini tidak kami temukan lapisan masyarakat agraris Petani Pemilik + Penggarap + Buruh Tani. Para petani pada lapisan ini selain menguasai sumberdaya agraria melalui pemilikan tetap dan pemilikan sementara (dengan cara mengusahakan lahan milik petani lain melalui sistem bagi hasil, sewa, atau gadai) juga dengan cara menjadi buruh tani. Satu hal yang berpeluang besar penyebabnya adalah selain masalah kesejahteraan, juga tidak adanya komoditi padi sawah/tadah hujan di dua lokasi penelitian ini.

Secara ringkas distribusi rumahtangga berdasarkan lapisan-lapisan tersebut berbeda di dua lokasi penelitian. Pada Gambar 1. distribusi rumahtangga berdasarkan lapisan-lapisan dimana non petani tidak termasuk di dalamnya, sehingga lapisan masyarakat agraris di Bojong Juruh adalah lima lapisan dan di Desa Kerta adalah tiga lapisan. Selanjutnya pada Gambar 2. distribusi rumahtangga berdasarkan lapisan-lapisan dimana non petani termasuk di dalamnya, sehingga lapisan masyarakat agraris di Desa Bojong Juruh adalah enam lapisan dan di Desa Kerta adalah empat lapisan.

Munculnya enam lapisan masyarakat agraris di lokasi penelitian menunjukkan bahwa pelapisan yang terjadi pada masyarakat agraris berbasis kombinasi komoditas sawit, karet, padi sawah lebih beragam dibandingkan dengan hasil temuan di sepuluh Desa padi sawah di Pulau Jawa pada Tahun 1979 dan Tahun 1981/1982. Dalam tulisan Wiradi (1984) Penduduk pedesaan di sepuluh Desa di Pulau Jawa dikelompokkan menjadi: (1) Pemilik penggarap murni, (2) Penyewa dan Penyakap Murni, (3) Pemilik Penyewa dan/atau Pemilik Penyakap, (4) Pemilik Bukan Penggarap, dan 5) Tunakisma mutlak. Struktur masyarakat agraris sebagaimana tertera pada Gambar 1. khususnya di Desa Bojong Juruh juga menunjukkan bahwa bentuk struktur masyarakat agraris yang muncul merupakan struktur agraris yang semakin terstratifikasi atau melipatnya sub-kelas komunitas petani menjadi banyak lapisan. Selain itu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dalam menjalankan pola hubungan sosial produksi sumberdaya agraria banyak rumahtangga petani yang melakukannya tidak secara eksklusif (hanya menjalankan satu pola hubungan sosial) tetapi mereka menjalankan beberapa pola hubungan sosial. Hal ini terjadi karena banyak petani pemilik yang luas sumberdaya agrariannya relatif sempit, apalagi pada pemilikan sumberdaya agraria produktif (lahan yang berproduksi). Nampaknya, pemilikan tetap yang luasnya relatif sempit menyebabkan penghasilan petani dari sumberdaya agraria yang menjadi miliknya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Oleh sebab itu, untuk memperbesar akses dalam penguasaan sumberdaya agraria, para petani tidak membatasi diri hanya pada pola penguasaan tetap tetapi mereka memperluasnya dengan menjalankan pola pemilikan sementara. Berbeda dengan fakta di Bojong Juruh, fakta di Desa Kerta menunjukkan bahwa bentuk struktur masyarakat agraris yang muncul merupakan struktur agraris yang

semakin terpolarisasi (tidak terlalu melipatnya sub-kelas komunitas petani menjadi banyak lapisan).

Secara keseluruhan, hasil sensus di dua komunitas petani menunjukkan bahwa proporsi lapisan petani yang memiliki status sebagai petani pemilik (tunggal + kombinasi) masih merupakan bagian terbesar dari komunitas petani (dominan). Walaupun demikian, petani tunakisma (petani penggarap, buruh tani, dan penggarap + buruh tani) sudah muncul di komunitas ini. Akan tetapi umumnya proporsi mereka masih merupakan bagian terkecil dari komunitas petani. Bila lapisan-lapisan petani tersebut dibandingkan di antara desa lokasi penelitian, proporsi petani pemilik (tunggal + kombinasi) paling tinggi terjadi pada komunitas di Desa Kerta, selanjutnya proporsi buruh tani paling tinggi di Desa Bojong Juruh dan di Desa Keta Penambahan jumlah lapisan non petani tidak begitu signifikan dalam proporsi jumlah lapisan pemilik yang dominan.

Ppetani pemilik yang luas sumberdaya agrariannya kurang dari 1.5 hektar umumnya sangat kecil di dua komunitas dan proporsi lapisan masyarakat yang memiliki luas lahan lebih besar dari 3.5 hektar secara keseluruhan relatif banyak. Hal ini juga relevan dengan luas rata-rata kepemilikan lahan pada dua komunitas adalah 5.1 hektar. (Tabel 7).

### **Diferensiasi Kesejahteraan Petani**

Berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan masyarakat setempat (melalui FGD berdasarkan tingkat kesejahteraannya, kedua komunitas petani sama-sama terbagi menjadi empat lapisan, yaitu: (1) miskin, (2) sedang/menengah, (3) kaya, dan (4) kaya raya. Realitas pelapisan kesejahteraan petani pada komunitas petani sawit sebagai-mana digambarkan ternyata berbeda dengan pelapisan kesejahteraan pada komunitas petani kakao, dimana pelapisan kesejahteraan pada petani kakao hanya mempunyai tiga lapisan. Sedangkan pada komunitas berbasis sawit terdiri dari empat lapisan (Tabel 8), yaitu: 1) miskin, 2) sedang, dan 3) kaya. Pada komunitas petani kakao, hasil rekonstruksi tidak menunjukkan adanya lapisan kaya raya. Realitas tersebut muncul karena pada komunitas petani sawit proses akumulasi surplus oleh pihak yang mampu relatif mudah dilakukan, khususnya melalui mekanisme akumulasi penguasaan lahan yang didukung oleh kredit perbankan.

Secara umum, kaitan antara status penguasaan sumberdaya agraria dengan tingkat kesejahteraan petani relatif sama, baik yang terjadi pada komunitas petani sawit dengan maupun yang terjadi pada komunitas petani kakao. Hanya saja pada komunitas petani sawit muncul lapisan petani pemilik kaya raya, sebagai bagian dari petani pemilik

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1) Dalam usaha pertanian (tanaman "komersial" perkebunan) lahan dan modal financial untuk penguasaan alat/bahan produksi pendukung lainnya. Hal ini mendorong struktur agraria baru, terutama munculnya "pola hubungan sosial produksi banyak pihak" dan/atau munculnya "pola hubungan sosial produksi dua pihak yang semakin terakumulasi/tersubordinasi: pemilik lahan yang semakin kuat dan penggarap yang semakin lemah".



- 2) Pola hubungan agraria mengakibatkan hasil/manfaat/keuntungan usahatani terbagi kepada banyak pihak. atau bila pemilik lahan juga menguasai alat/bahan produksi lainnya dan/atau modal finansial maka hasil/keuntungan usahatani semakin terakumulasi pada pemilik lahan.
- 3) Berdasarkan penguasaan lahan (penguasaan tetap ditambah penguasaan sementara), data hasil sensus di lokasi penelitian menunjukkan bahwa struktur agraria komunitas petani berbasis tanaman sawit dan karet dibangun oleh beragam lapisan masyarakat yang sangat beragam, yaitu pemilik, pemilik + penggarap, pemilik + buruh tani, penggarap, penggarap + buruh tani, dan buruh tani. Proporsi petani yang hanya pemilik, di seluruh lokasi penelitian mencapai 79 %, dan rata-rata pemilikan lahan di dua lokasi penelitian adalah 5.1 hektar/KK.
- 4) Struktur agraria yang ada saat ini masih cenderung terstratifikasi atas banyak lapisan, tetapi juga terdapat beberapa mekanisme yang cenderung mendorong terjadinya proses polarisasi.
- 5) Mekanisme yang mendorong perubahan struktur agraria menuju stratifikasi adalah: pola bagi hasil dan pewarisan dan mekanisme yang mendorong polarisasi adalah penjualan kebun, gadai, dan buruh upahan serta akses petani terhadap program pemerintah/perusahaan.
- 6) Peluang lapisan bawah untuk memiliki kebun sendiri semakin kecil karena ketertatasan lahan yang dapat mereka akses (buka kebun) dan keterbatasan modal untuk membeli lahan baru.
- 7) Masih banyaknya petani miskin karena penguasaan lahannya sempit dan/atau karena tidak mampu mengusakan lahan secara produktif harus menjadikan program **reforma agraria** dan program **revitalisasi perkebunan** berada dalam sebuah rangkaian atau kerangka yang tidak terpisahkan. Dalam hal ini reforma agraria harus menjadi landasan tolak/**pembuka jalan** melalui pemberian akses sumberdaya agrarian/lahan kepada para pekebun (terutama pekebun miskin) dan revitalisasi perkebunan sebagai **supporting system** yang memberikan akses kepada para pekebun (terutama pekebun miskin) dalam penguasaan permodalan; teknologi dan input pertanian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2002. *Perkembangan Persiapan Pelaksanaan Revitalisasi Perkebunan*. Bahan Panduan Dukungan Badan Litbang dalam Program Revitalisasi Perkebunan.
- Scott, James C. 1989. *Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES: Jakarta.
- Sitorus, MT. Felix. 1999. *Pembentukan Golongan Pengusaha Lokal di Indonesia. Pengusaha Tenun dalam Masyarakat Batak Toba*. Disertasi. Fakultas Pascasarjana IPB: Bogor.
- Soentoro. 1980. *Pengaruh Penguasaan Tanah Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi di Pedasaan. Studi Kasus Dua Desa di Jawa Timur*. Tesis. Sekolah Pasca

Sarjana – IPB. Bogor.

Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus. Desain dan Metoda*. PT. Raja Grafitia Persada: Jakarta.

Wiradi, G. 1984. *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria* dalam Tjondronegoro (editor) *Dua Abad Penguasaan Tanah*. PT Gramedia: Jakarta.

## Lampiran

Tabel 1. Luas Areal Perkebunan Komoditas Utama Tahun 2002

Komoditas	PR	PBN	PBS	Total
Karet	2.882.795 (85)	212.617 (6)	277.009 (8)	3.372.421 (100)
Sawit	1.190.154 (32)	516.447 (14)	2.050.739 (55)	3.757.340 (100)
Kopi	1.192.322 (95)	40.645 (3)	27.720 (2)	1.260.687 (100)
Kakao	641.133 (85)	52.690 (7)	56.091 (7)	749.914 (100)
Teh	67.100 (44)	44.263 (9)	42.312 (28)	153.675 (100)
Tebu	171.279 (50)	64.133 (19)	105.248 (31)	340.660 (100)
Total	6.144.783	930.795	2.559.119	9.634.697 (100)
Rata-rata	64	10	27	100

Sumber data : Direktorat Jenderal Perkebunan (2003)

Tabel 2. Perbedaan Rasionalitas Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit

Keterangan	Struktur Agraria elapa Sawit	Struktur Agraria Kakao
Pendekatan utama kebijakan agribisnis	perkebunan besar	perkebunan rakyat
Kebutuhan program pemerintah	deregulasi	regulasi
Pelaku utama kapitalisasi	negara dan swasta	rakyat
Kebutuhan modal	tinggi	rendah
Intensitas on-farm	tinggi	rendah
Pola adaptasi ekologi	penaklukan alam	selaras alam
	kebun monokultur	kebun campuran
Ikatan dengan pabrik/pihak luar	tinggi	rendah
Kemandirian pekebun	rendah	tinggi

Tabel 3. Latar Belakang Spesifik Lokal, Pola Pengembangan, dan Lokasi Penelitian

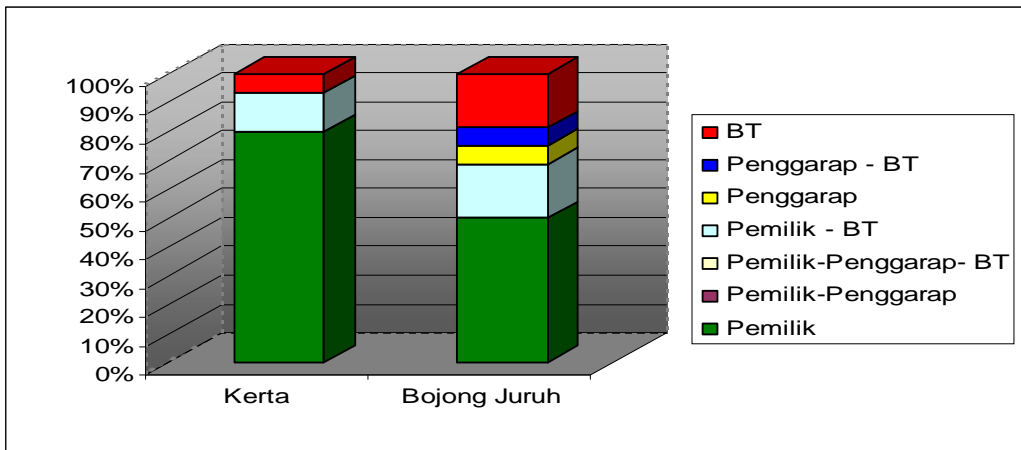
LATAR BELAKANG SPESIFIK LOKAL KOMUNITAS	POLA PENGEMBANGAN	
	Plasma	Swadaya
KOMUNITAS PEKEBUN KAKAO		
• Etnis Lokal	-	Sulawesi Tengah dan NAD
• Etnis Pendatang	-	Sulawesi Tengah
KOMUNITAS PEKEBUN KELAPA SAWIT		
• Etnis Lokal	-	Banten
• Etnis Pendatang	- Riau	Banten

Tabel 4. Perbedaan Intervensi Pihak Lain (Pemerintah/Perusahaan) dalam Berbagai Pola Pengembangan Perkebunan

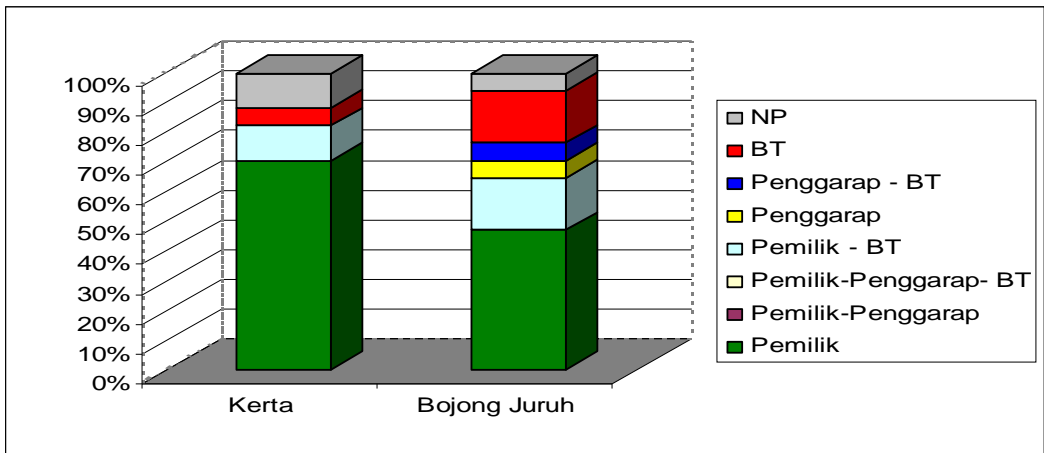
Intervensi Pemerintah/Perusahaan	Plasma	Swadaya	
		Berbantuan/ Partial	Murni
Penyediaan Lahan	Pemerintah/perusahaan	Sepenuhnya inisiatif dan kemampuan Petani	Sepenuhnya inisiatif dan kemampuan Petani
Penyediaan Input Lain	Pemerintah/perusahaan selama kebun belum menghasilkan (4 tahun). Setelah itu, perusahaan masih ikut mengatur	Pemerintah selama 1 tahun. Selanjutnya tergantung inisiatif dan kemampuan petani	Sepenuhnya inisiatif dan kemampuan Petani
Pengolahan dan Pemasaran	Diatur bersama antara perusahaan dan petani	Sepenuhnya inisiatif dan kemampuan Petani	Sepenuhnya inisiatif dan kemampuan Petani

Tabel 5. Perbandingan di Dua Lokasi Penelitian

No	Karakteristik Pembeding	Desa Kerta	Desa Bojong Juruh
	Komunitas Petani dan Pembentukan Komunitas	Tempat tinggal warga berdekatan dan terpusat di Dusun	Tempat tinggal warga berdekatan dan terpusat di Dusun dan Perkampungan yang tertata rapi
	Keragaman Etnis	Dominasi Etnis Lokal	Dominasi Etnis Lokal
	Komoditas	Dominasi Sawit, Kelapa	Dominasi Sawit, Karet, Kelapa dan Padi Sawah
	Agro-ekosistem	berbukit (kebun)	Berbukit (kebun)
	Ukuran Komunitas/Desa	895 KK (besar)	847 KK (besar)
	Mata pencaharian Utama	Petani, swasta, buruh tani, pedagang, dan PNS	Petani, Penggarap, Buruh Tani, Pedagang, dan pegawai
	Struktur Pengelolaan Kebun	Diusahakan sendiri, diupahkan	Diusahakan sendiri, diupahkan dan bagi hasil
	Kondisi Kesejahteraan	Secara umum lebih sejahtera dibandingkan Desa Bojong Juruh.	Relatif Sejahtera
	Pemilikan lahan	Rata-rata lebih luas di Desa Kerta	Rata-rata kepemilikan lahan lebih sempit



Gambar 1. Struktur Masyarakat Agraris di Desa Lokasi Penelitian, 2008.  
 (Sumber data : Sensus Rumahtangga Melalui Diskusi dengan Informan Kunci)



Gambar 2. Struktur Masyarakat Agraris di Desa Lokasi Penelitian, 2008.  
 (Sumber data : Sensus Rumahtangga Melalui Diskusi dengan Informan Kunci)

Tabel 6. Distribusi Rumahtangga Petani Berdasarkan Status Penguasaan Sumberdaya Agraria di Desa Bojong Juruh dan Desa Kerta, 2008

Status dalam Penguasaan Sumberdaya Agraria	Desa Kerta		Desa Bojong Juruh	
	N	%	N	%
1. Pemilik	42	68	32	47
2. Pemilik+penggarap	0	0	0	0
3. Pemilik+penggarap+BT	0	0	0	0
4. Pemilik+BT	12	17	12	17
5. Penggarap	0	0	6	9
6. Penggarap+BT	0	0	6	9
7. BT (Buruh Tani)	6	10	9	13
8. Non Petani	8	12	4	6
Total	68	100.0	68	100.0
A. Total Pemilik	56	85	44	64
B. Total Tunakisma	6	9	20	
• Tunakisma Tidak Mutlak (Penggarap)	0		0	0
• Tunakisma Mutlak (Buruh Tani)	6	9	9	13
C. Non Petani	8	12	4	6

Tabel 7. Distribusi Rumah Tangga Petani Berdasarkan Luas Pemilikan Sumberdaya Agraria Total, di Desa Bojong Juruh dan Kerta, 2008

Luas Pemilikan	Desa Bojong Juruh		Desa Kerta		Total	
	N	%	N	%	N	%
< 1.5	17	27	0	0	17	14
1.5-3.5	40	62	22	37	62	50
>/ 3.5	7	11	38	63	45	36
Total	64	100	60	100	124	100
Rata-rata	2.1		8		50.1	
Tertinggi (ha)	20		100		100	

Sumber data : Sensus Rumahtangga Melalui Diskusi dengan Informan Kunci

Tabel 8. Distribusi Petani Desa Kerta Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Tingkat Kesejahteraan	Jumlah KK/ Proporsi		Ciri Sosial Ekonomi	
	Desa Kerta	Desa Bojong Juruh	Desa Kerta	Desa Bojong Juruh
Miskin	25 %	20 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kebun milik &lt; 1.5 ha</li> <li>- Tidak punya lahan</li> <li>- Buruh lepas</li> <li>- Rumah papan</li> <li>- Pemilik, penggarap dan atau buruh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan &lt; 2- 5 kapling</li> <li>- Rumah papan</li> <li>- Buruh lepas</li> <li>- Rumah papan</li> <li>- Pemilik, penggarap dan atau buruh</li> </ul>
Sedang	60 %	59 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kebun milik 1.5– 3 ha</li> <li>- Rumah setengah permanen</li> <li>- Pemilik, penggarap dan atau buruh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan 5.8 kapling</li> <li>- Rumah setengah permanen</li> </ul>
Kaya	10 %	10 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kebun milik &gt; 3 ha</li> <li>- Pegawai</li> <li>- Rumah permanen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan &gt; 10 kapling</li> <li>- Rumah permanen</li> </ul>
Kaya Raya	5 %	1 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas kebun milik &gt; 20 ha</li> <li>- Rumah mewah (bertingkat + pagar)</li> <li>- Mobil mahal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lahan &gt; 50 kapling</li> <li>- Rumah mewah (bertingkat dan pagar permanen)</li> </ul>

Sumber Data : Hasil Rekonstruksi Masyarakat (FGD) Keterangan : 1 kapling = 1.5 hektar

